

Jakarta, 21/8/2014 (Kominfonewscenter) – Ekonom senior Dr.Rizal Ramli menyarankan, agar pemerintah ke depan berani membuat terobosan dan inisiatif dalam kebijakan ekonominya, untuk itu RAPBN 2015 harus dibongkar dan diperbaiki postur penganggarannya.

“Pos-pos seperti subsidi listrik dan BBM, harus benar-benar dibedah. Apakah benar solusi menyelamatkan APBN adalah dengan memangkas subsidi yang pasti memberatkan rakyat”, kata Rizal Ramli pada diskusi bertema “Membedah RAPBN 2015” di press room DPR, Kamis (21/8).

“Saya yakin, yang terjadi adalah inefisiensi, KKN, dan salah manajemen. Pemerintah harus cerdas, jangan selalu mengambil langkah gampang dengan menaikkan harga. Itu tidak kreatif. Kalau menyusun anggaran hanya begitu caranya, cukup anak kuliah semester 1 juga bisa,” kilahnya diiringi derai tawa peserta diskusi.

Menurut Rizal RAPBN 2015 menunjukkan, di akhir pemerintahannya tim ekonomi Presiden SBY sama sekali tidak bisa membaca keadaan. “Mereka sepertinya tidak mampu melihat adanya dua tantangan strategis yang bakal dihadapi pemerintah berikutnya,” ujar Rizal.

“Jika pemerintah ke depan canggih, saya yakin ekonomi bisa tumbuh 7%. Tahun berikutnya naik lagi jadi 9%. Pada tahun ketiga kita bisa tumbuh dua digit. Saat itulah Indonesia akan terbang, rakyatnya hidup sejahtera dan disegani,” kata Rizal Ramli yang juga Menteri Keuangan zaman Gus Dur.

Rizal mengemukakan, bukti dari ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah sekarang dalam membaca tantangan bangsa adalah RAPBN 2015 disusun tanpa ruang gerak fiskal berarti.

RAPBN juga tidak mampu memberi stimulus, dan sama sekali tidak ada terobosan yang berarti, mereka menyikapi tantangan ke depan seperti business as usual, ini adalah bom waktu yang

sangat berbahaya.

“Siapa pun presidennya, harus berani membongkar RAPBN 2015. Sebab, kalau APBN itu dilaksanakan, dipastikan tidak akan ada perubahan berarti. Tahun depan ekonomi hanya akan tumbuh sekitar 5-5,5%. Rakyat akan kecewa dan mungkin malah jadi marah,” ungkap Rizal.

Hal senada juga disampaikan Hendrawan Supratikno FPDI-P, menurutnya, RAPBN yang disodorkan pemerintahan SBY di masa akhir ini sama sekali tidak memberi ruang gerak di bidang fiskal.

Begitu ketatnya, lanjut dia, hingga jika pemerintah bermaksud mencari utang baru, maka plafonnya maksimal hanya Rp20 triliun.

“Saya menyebutnya RAPBN kali ini benar-benar buruk, bahkan yang terburuk dalam sejarah kita. APBN miskin stimulus dan miskin terobosan. Seperti kata bang Rizal, tanpa kebijakan terobosan, presiden bisa mati berdiri,” tukasnya.

Hendrawan menjelaskan, setelah APBN disampaikan pemerintah, fraksi PDI-P di DPR tiap Selasa berkumpul untuk menyiasati agar bisa menjadi pendorong perekonomian.

“Apa yang disampaikan senior dan mentor saya, bang Rizal Ramli, sudah sangat tepat. Bisa dikatakan masukan-masukan tadi seperti setengah jadi. Tinggal dirapikan dan dieksekusi,” ungkapnya. (mhd)